



**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
REPUBLIK INDONESIA
DEPUTI BIDANG KOORDINASI PENGELOLAAN ENERGI,
SUMBER DAYA ALAM, DAN LINGKUNGAN HIDUP
Jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 2 - 4 Jakarta 10710
Telepon: 021-3500901 ; Faksimile: 021-3441261**

**NOTULENSI RAPAT TIM PELAKSANA TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF
TENTANG PERSETUJUAN LAPORAN EITI 2017**

A. Pendahuluan

1. Gambaran Umum

Kegiatan Rapat Tim Pelaksana diadakan dalam rangka untuk Persetujuan Laporan EITI 2017 untuk memenuhi persyaratan dalam Standar EITI.

Acara Rapat Persetujuan Laporan EITI 2017 ini dihadiri oleh:

1. Pemerintah Pusat : Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian ESDM, BPKP, Kementerian Keuangan, , SKK Migas
2. Perusahaan dan Asosiasi : Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia, Asosiasi Pertambangan Indonesia
3. Administrator Independen : PT Veda Praxis
4. Sekretariat EITI

3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari rapat ini adalah untuk mendapatkan Persetujuan Laporan EITI 2017 yang telah disusun sejak bulan Oktober 2019.

2. Dasar

Undangan Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup selaku Ketua Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif Nomor: EITI-107/D.III.M.EKON/12/2019 tanggal 18 Desember 2019.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Rapat Tim Pelaksana dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2019 di Ruang Rapat Mahakam Lantai 3, Gd. Ali Wardhana Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan dari Kedeputan III Kemenko Perekonomian, Sekretariat EITI, Pusdatin Kementerian ESDM, Ditjen Minerba Kementerian ESDM, SKK Migas, Ditjen Anggaran Kemenkeu, Ditjen Pajak, Kemenkeu, BPKP, Asosiasi Pertambangan Indonesia (IMA) dan Asosiasi Perusahaan Batubara Indonesia (APBI).

C. Pemaparan

1. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Assalamualaikum Wr. Wb , Selamat siang dan Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kami mengucapkan banyak-banyak terimakasih Bapak dan Ibu anggota MSG dan Tim Independent Administrator, hari ini sesuai dengan kesepakatan minggu lalu kita masih akan melihat untuk hasil final laporan yang terakhir untuk dibahas hari ini dan kita akan lihat apakah semuanya sudah oke untuk disetujui.
- Saya diminta Pak Bastian untuk memulai rapatnya saja, untuk proses persetujuan laporan EITI 2017 dan soft copy nya sudah di edarkan dan karena temen-temen IA atas masukan-masukan yang baru diterima selesai kemarin dan kita edarkan dan buku yang seperti ini dicetaknya hanya 5buku yang tidak kebagian bisa lihat di soft copynya. Hari ini saya minta Tim IA mempresentasikan apa saja masukan yang dari minggu lalu sampai dengan hari senin atau selasa, dan itu semua sudah dimasukkan ke dalam laporan resminya untuk temen-temen MSG jika masih ada masukan lagi silahkan tapi kita tidak harapkan masukkan yang besar lagi karena tim la sudah tidak punya waktu lagi dan sepertinya teman-teman IA harus lembur karena harus mengejar layout nya meskipun ada beberapa hari libur natal dan kita harapkan sebelum tanggal 30 sudah bisa di upload di website kita untuk soft copy nya sesuai dengan persyaratan, oke itu yang bisa kita sampaikan mungkin bisa langsung saja Tim IA untuk mempresentasikan silahkan.

2. Dadan Gunawan – Konsultan IA

- Terimakasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Sesuai dengan rencana hari ini kita membahas final report semoga apa yang kita bahas hari ini sudah final sehingga kita sudah bisa memulai proses selanjutnya dan sebagai catatan yang kita bahas sekarang ini adalah revisi masukan pada pertemuan kita tanggal 13 Desember lalu dan masukan tertulis sampai dengan rabu kita terima seperti biasa akan dibagi menjadi dua bagian rekonsiliasi dan kontekstual.
- Baik lanjut saja untuk rekonsiliasi, kita bisa masuk ke update rekonsiliasi secara umum sejak hari minggu lalu sebanyak 71 menjadi 74 yang 2 masuk dengan excel file sehingga bisa langsung di rekonsiliasi dan sudah bisa dilihat angkanya dan 1 nya lagi bentuknya PDF masih dalam proses rekonsiliasi, kalau ditanya kenapa kok lama karena kompleks sekali word book nya itu panjang jadi kalau bentuknya PDF itu harus kita input satu per satu informasinya sementara kalau excel bisa copy paste saja.
- Summary nya mungkin bisa sampaikan sekali lagi bahwa kita sudah sampaikan di executive summary bahwa comprehensiveness dan data quality seperti permintaan dari EITI Global dan comprehensiveness mungkin perlu dibaca ada di tabel awal dan data quality EITI Global meminta kami Independent Administrator menyampaikan bahwa data yang masuk ke entitas pelapor itu bersifat audited namun karena kita tidak bisa menjamin bahwa semua data yang masuk itu audited maka Global akhirnya mau menerima bahwa kita cukup menyampaikan bahwa data yang masuk sudah di sertifikasi oleh pihak yang berwenang dari entitas pelapor itu dianggap cukup.
- Ini yang dimaksud dengan comprehensiveness saya tidak akan menerangkan panjang lebar silahkan dibaca sendiri dan kemudian ini yang melaporkan dari KKKS tidak berubah masih 73 dari 77 atau 94,81% untuk operatornya, dan untuk non operatornya 72 dari 77 juga tidak berubah, instansi yang tidak melapor 70 dari 11 artinya dalam hal ini Pertamina yang belum melapor.
- Kemudian dari minerba ada 73 kita belum berani melaporkan 74 karena angkanya belum masuk namun ini adalah angka yang benar benar masuk secara excel dan rekonsiliasi jadi nanti pasti ada

kenaikan lagi namun naiknya berapa masih dihitung. Kemudian di instansi pemerintah ada 9 dari 10 yang belum masuk adalah Pemda Jatim.

- Sekarang kita bicara mengenai status per 18 Desember untuk instansi pemerintah di migas jumlahnya komponennya 11 tidak ada perubahan dan KKKS juga tidak berubah baik partner maupun operator.
- Entitas yang tidak melapor adalah dari instansi Pemda Jatim untuk Migas dan KKKS yang tidak melapor yang di terminasi ada 4 masih sama informasinya dan yang non operator yang belum juga masih sama informasinya dari minggu lalu.
- Kemudian perusahaan yang belum melampirkan formulir BO sejumlah 12 dari 73 perusahaan. Kemudian untuk LO Perusahaan yang belum melapor untuk operatornya ada 4 sementara partnernya ada 3, untuk KKKS yang tidak menyampaikan LO terkait dengan Bakrie Group kemudian untuk partner ada GULF, KUFPEC dan Talisman.
- Dengan demikian kami bisa laporkan bahwa nilai PPh per 18 Desember 2019 yang sudah masuk datanya dari KKKS sebesar 31 triliun dari partnernya 13,8 triliun sehingga totalnya 14,568 jika dibandingkan dengan PPh Migas berdasarkan LKPP 2017 kita sudah 91,14%.
- Kemudian PNPB untuk migas Government Lifting dari 73 KKKS yang sudah melaporkan mereka sudah melaporkan 9,638 miliar dollar dan yang tidak melaporkan karena diterminasi ada 284 juta dollar sementara untuk under over lifting KKKS yang melaporkannya dari 73 operator 132 juta dollar dan KKKS yang diterminasi 613 ribu dollar sehingga bisa kita laporkan bahwa total untuk government lifting dan over under lifting sebesar 9.7 miliar dollar dengan persentase 97,16% dan KKKS yang diterminasi 2,84% dari total keseluruhan dari 10 miliar dollar government lifting dan over under lifting.
- Rekonsiliasi KKKS dengan SKK Migas 11,84% yang lain baik-baik saja hanya row nomor 5 yang masih rekonsiliasi angkanya masih diatas 5% yaitu 11,84% untuk over under lifting gas penyebabnya karena dispute dengan intersert cos recovery dari KKKS dengan SKK Migas, dalam hal ini Conoco Philips. Kemarin sudah kami sampaikan mengenai dispute ini.
- Kita bicara dengan Volume antara KKKS dengan SKK Migas baik-baik saja, kemudian rekonsiliasi KKKS dengan Ditjen Migas yang kami sampaikan minggu lalu dan menjadi rekomendasi juga dalam laporan EITI tahun 2017 di rekonsiliasi total lifting minyak dan gas antara KKKS dan Ditjen Migas untuk laporan EITI 2017 karena data atas total lifting minyak dan gas dalam volume sudah di rekonsiliasi antara KKKS dan SKK Migas.
- Kemudian rekonsiliasi dengan DJP masih bekerja minggu ini kami bisa sampaikan bahwa rekonsiliasi KKKS dengan DJP sudah dibawah 5%. Penyebab perbedaan setelah rekonsiliasi walaupun kecil angkanya perlu kami sampaikan terdapat 45 juta dollar berasal dari jumlah perusahaan 29 itu karena hasil rekonsiliasi Independent Administrator dan DJP ketika menemukan perbedaan dan melakukan konfirmasi ke perusahaan dan perusahaan tidak merespon kemudian ada perubahan participating interest dari inpx natuna ke medco south natuna hanya 2,452 juta dollar.
- Rekonsiliasi KKKS dengan DJA masih diatas 5% atau 7% untuk PPN Reimbursement walaupun turun drastis angkanya dari 2,8 triliun menjadi 1 triliun namun demikian bisa kami sampaikan bahwa 7% perbedaan tersebut di sumbang oleh terminasi namun tidak ada datanya sebesar 414 miliar dan karena tidak kembali para pelapor itu juga kami sampaikan perbedaannya tidak dikembalikan apa penyebabnya sebesar 340 juta dollar kemudian timing difference ini juga cukup besar ini ada cut off di Januari uangnya sudah di kirim DJA karena perusahaan sudah tutup bank nya menganggap itu diterima di bulan Januari karena pelaporan EITI bersifat cash basis.
- Kemudian kami lanjutkan rekonsiliasi SKK Migas dengan DJA tidak ada perbedaan semuanya sama untuk data yang tidak di rekonsiliasi dalam hal ini PPN Wapu ada 8,7 triliun kemudian PBB 7,5 triliun PDRD 6,3 miliar.

- Kemudian untuk CSR dalam in cash ada 22 milliyar kemudian dalam bentuk in kind ada 121 milliyar in cash dalam USD 598 ribu dollar kemudian in kind dalam ribuan 3,7 juta dollar.
- Data Pemda yang tidak di rekonsiliasi migas masih sama dengan minggu kemarin.
- Kita masuk ke Minerba sampai dengan 18 Desember instansi pemerintah yang belum melapor masih belum berubah dari minggu lalu masih Pemda Jatim yang belum melapor kemudian untuk entitas perusahaan naik dari sebelumnya 71 yang melapor menjadi 73 kemudian dan minggu ini kemungkinan menjadi 74 sehingga persentase yang melapor 73 dibandingkan 122 sekitar 58,83% , disisi kiri bawah bisa kami sampaikan terdapat 3 perusahaan yang sedang di rekonsiliasi artinya selama satu minggu kemarin dari Sago Prima masih dalam bentuk PDF kemudian Mitra Bersaudara dan Prolindo Cipta Nusantara masuk tanggal 19 Desember artinya baru kemarin.
- Kontribusi entitas yang belum melapor dari Pemda Jawa timur tentu saja informasinya tidak ada tidak di respon kemudian entitas perusahaan yang belum melapor dari 44 perusahaan yang belum melapor maka kontribusinya untuk PHT dan Landrent 3,1 trilliun atau 7,63% sedangkan 5 perusahaan yang tidak berproduksi 231 milliyar atau 0,57% sehingga total yang tidak melapor 3,3 trilliun atau 8,81% dari Total PNPB 122 perusahaan setelah di rekonsiliasi. Bapak Ibu bisa lihat ada 5 perusahaan yang tidak berproduksi ini masih sama informasinya dari minggu lalu.
- Ini adalah perusahaan yang belum melampirkan BO sejumlah 14 dari 73 perusahaan, kemudian perusahaan yang belum melampirkan LO ada 7 dari 73 perusahaan atau 9,59%. Perusahaan yang belum lapor LO pajaknya ada 7.
- Kontribusi entitas pelapor untuk minerba hasil rekonsiliasi sampai dengan 18 Desember kontribusi yang sudah lapor dari 73 perusahaan untuk royalti sebesar 18,1 trilliun PHT 16,2 trilliun luran tetap 107 milliyar sehingga total PNPB dari 73 perusahaan yang sudah melapor 34,5 trilliun.
- Kemudian persentase terhadap PNPB dari perusahaan yang sudah melapor tersebut adalah 84,84% coveragennya sementara jika kita bandingkan dengan total sampel 122 sampel perusahaan coveragennya 34,5 trilliun itu adalah 91,80% dan yang belum melapor sebesar 49 perusahaan itu 3 trilliun atau 8,20%.
- Kontribusi entitas pelapor minerba untuk pajak kontribusi berdasarkan 56 perusahaan data pajak dari DJP untuk PPh badan 25 trilliun atau 70% dari total penerimaan pajak sebesar 35,8 trilliun untuk PPh sebesar 1,6 trilliun atau 4,71% sehingga total PPh badan dan PPh dari 56 perusahaan sebagai persentase total penerimaan pajak 74,70% jauh lebih rendah dari migas dari sudut coveragennya.

- **Tanggapan : Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Data 49 perusahaan yang belum lapor di tabel yang barusan 8,2% tapi dari tabel yang sebelumnya kontribusi entitas belum lapor minerba itu 49 perusahaan 8,81% angkanya 3,3 trilliun yang ini 3,1 trilliun yang mana yang benar ? yang inikan 3,1 ya di slide sebelumnya 8,84 kan, harusnya 49 tolong di koreksi saja nanti. Maksud saya jumlahnya kan 3,1 trilliun dan persennya 8,2 dan yang dibelakang 3,3 trilliun 8,81% mana yang benarnya? Dan nominal angkanya juga beda yang ini 3,3 yang pertama yang berikutnya 3,1 kalau dari persentasenya saya kurang tahu dari 4,7 itu saja, di catat saja dulu.
- Rekonsiliasi perusahaan dengan Ditjen Minerba, untuk yang currency nya USD untuk royalti 0,78% PHT nya juga 0,38% harusnya USD maupun rupiah dibawah 5% consiling item nya.
- Rekonsiliasi perusahaan minerba dengan DJP untuk PPh badan dan PPN dalam mata uang USD tidak ada masalah kemudian yang mata uang rupiah untuk PPh badan masih ada 2,46% reconciling item masih di bawah 5% kemudian untuk PPN nya cukup besar sekitar 27,98% alasannya bisa dilihat di slide setelahnya karena pengisian formulir tidak lengkap atau salah kemudian kesalahan mata uang kesalahan pembagian royalti dengan PPHT kemudian kesalahan pengisian formulir dengan menggunakan accrual basis sebelumnya cash basis.

- Rekonsiliasi perusahaan minerba dengan KAI yang dilaporkan dengan mata uang USD maupun rupiah tidak ada perbedaan. Kemudian data yang tidak di rekonsiliasi minerba dalam jutaan rupiah PBB 670 milliyar PPn batubara 66 milliyar iuran tetal 13,9 milliyar PDRD 592 milliyar kemudian pembayaran langsung ke Pemda 392 milliyar dalam USD ribuannya iuran tetaknya 3,4 juta dollar PDRD 14,3 juta dollar sedangkan pembayaran langsung ke pemda dalam ribuan USD 1 milliyar dollar.
- Kemudian CSR dalam bentuk in kind dalam jutaan rupiah 288 milliyar dalam USD 47,5 juta dollar kemudian in cash dalam rupiah 240 milliyar kemudian dalam ribuan USD 46,4 juta dollar.
- Data yang tidak di rekonsiliasi di minerba untuk penyediaan infrastruktur dalam jutaan rupiah 26 milliyar kemudian USD 2,7 juta dollar, untuk penggunaan kawasan hutan 710 milliyar untuk USD 342 ribu, dana jaminan reklamasi 592 milliyar dalam USD 42 juta dollar dana pasca tambang 210 milliyar dalam ribuan USD 43 juta dollar kemudian volume produksi dalam ribuan ton itu 375 juta ton, kemudian volume penjualan dalam negeri dalam jutaan rupiah 63 triliun dalam USD 3.6 milliyar dollar kemudian volume 3,1 milliyar ton, volume penjualan luar negeri dalam jutaan rupiah 12,3 triliun dalam ribuan USD 19,5 milliyar dollar kemudian volumenya 488 juta ton, volume penjualan berdasarkan tempat muatnya 72,6 triliun dalam ribuan USD 23 milliyar dollar volume dalam ribuan ton 1,3 milliyar ton volume penjualan berdasarkan provinsi 54,6 triliun dalam ribuan USD 22,4 milliyar dollar volume dalam ribuan ton 1,3 milliyar ton DMO batubara 49 juta ton, pembayaranlain ke BUMN 4,3 triliun kemudian dalam ribuan USD 8,3 juta dollar.
- **Tanggapan : Edi Effendi – Sekretariat EITI**
 - Yang volume produksi sama volume penjualan dalam negeri – luar negeri bagaimana mencocokkannya untuk volumenya? Volume produksinya 375 ribu angkanya yang dalam negerinya 3,18 juta ton yang luar negerinya 488 yang volume produksi itu bukan volume produksi total? (Jawab : dalam ribuan ton ya pak ya 375 juta ton) tapi yang bawahnya 3 juta dalam ribuan juga tau tidak ? apa mungkin salah digitnya? Kan volume total dalam negeri – luar negeri (Jawab : oke pak kita catat dulu ya pak)
- Data pemda yang tidak di rekonsiliasi untuk minerba, untuk Kalimantan Selatan PBB nya 34 triliun PAD nya 617 milliyar, kemudian Kalimantan Timur PBB 9,5 triliun dengan PAD 2,5 triliun, Riau PBB 102 triliun dan PAD 156 juta rupiah, untuk Sumatera Selatan PAD 1 triliun dan Jawa Timur tidak ada informasinya.
- Rekomendasi ada sedikit yang diperbaiki oleh SKK Migas nanti offline saja di koreksi bersamaan setelah ini.
- **Tanggapan : Ahmad Bastian – Asisten Deputi Industri Ekstraktif, Kemenko Perekonomian**
 - Untuk Jawa Timur kok kosong ? (Jawab : Ada di rekomendasi bisa dibuka jadi surat yang kita sampaikan ke Provinsi memang tidak ada cc ke Dispenda sementara kita bicara sekarang dari dispenda tapi provinsi yang lain baik-baik saja meskipun tidak ada cc ke dispenda masih mau membantu hanya Jawa Timur yang tidak mau membantu) . Tapi kan Jawa Timur anggota Timlak? Jadi harusnya tidak perlu disposisi. (Jawab : Mungkin pejabat Dispendanya ganti pak) . Sebenarnya kami sudah mengirimkan orang ke Surabaya mencari surat ini ada dimana, jadi kami pun mengambil kesimpulan bahwa mereka tidak mau melaporkan ini karena tidak ada Disposisi. Jadi mungkin perlu ditetapkan saja di Timlak PIC nya bukan hanya anggota timlak sehingga surat menyurat selalu di cc ke PIC nya, ini bukan hanya pemda sih pak jadi ketika anggota MSG adalah bukan PIC untuk laporan ini memang ketika dilapangan ditemukan problem.
- **Tanggapan : Bayu – SKK Migas**
 - Untuk yang rekonsiliasi ada 3 yang substansial menurut kami, pertama masalah data yang direkon Demob kan masuk ke data yang di rekon ya, tapi penyajian di halaman 25-26 nya berbeda, halaman 23-25 nya belum dimasukkan ke dalam pendapatan yang direkon itu

yang perlu diperbaiki jadi substansinya bahwa itu data yang di rekon di halaman 25 dan 23.

- Kemudian untuk tabel itukan, lifting KKKS substansi paragrafnya dibilang 28 tapi penomorannya disana 29 jadi perlu disesuaikan kembali drafting bawah dengan table yang diatas narasi dengan urutan tabelnya.
- Kemudian yang terakhir masalah rekomendasi substansinya agak berbeda agar bisa di sesuaikan kembali substansinya karena kalau di konversi lebih kecil, kemudian satu lagi masalah definisi FTP halaman 44 karena kita menggunakan satu saja jadi tidak perlu ada penggunaan penjelasan FTP karena sudah ada di glossary .(Jawab : Ini sudah ada di matriks yang mas bayu sampaikan?) tidak ini baru berdasarkan laporanyang kami terima hari ini, kita sudah notes disini.

3. Ketut – Konsultan IA

- Terimakasih, Selamat sore Bapak Ibu anggota MSG untuk kontekstual ada dua tabel yang kita sampaikan kita bagi berdasarkan minyak dan gas alam ada 63 item untuk mineral 13 item. Untuk migas 63 item terdiri dari tambahan 9 item dan yang dihapus 3 item dan revisi 51 item, untuk mineral semuanya 13 nya revisi. Sebenarnya hanya worning saja terutama yang di revisi kecuali yang di tambah dan yang dihapuskan, yang 51 itu revisi apakah mau dibahas satu persatu ada di tabel itu, existngnya apa tadinya terus revisinya apa terus sebagiannya apa di halaman berapa keterangan sudah kita lakukan ada 63 item. Saran saya mungkin dari yang tambahan saja dulu kemudian yang dihapuskan kemudian yang revisi secara signifikan kita bahas.
- Untuk yang tambahan ada dihalaman 16 untuk SKK Migas ditambahkan peraturan Menteri ESDM No.53 tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan menteri ESDM No.17 tahun 2017 tentang organisasi dan tata kerja satuan kerja khusus pelaksanaan kegiatan kerja usaha minyak dan gas bumi. Itu masukan dari SKK Migas untuk ditambahkan, tambahan kedua juga dari SKK Migas dihalaman 28 Sub Bab 3 Point 2.1 Peraturan Pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi sebagaimana telah diubah di peraturan pemerintah nomor 55 tahun tahun 2009 tentang perubahan ke dua atas perubahan peraturan pemerintah nomor 35 tahun 2004 tentang kegiatan usaha hulu migas dan gas bumi dihalaman 28.
- Kemudian tambahan yang ketiga itu dari SKK Migas halaman 42 PMK nomo 118/PMK.02/2019 tentang tata cara pembayaran DMO over lifting kontraktor dan atau under lifting kontraktor dalam kegiatan untuk usaha kegiatan hulu minyak dan gas bumi.
- Yang ke empat dihalaman 54 ditambahkan keterangan kriteria dan besaran komponen split dalam tabel berdasarkan Permen ESDM nomo 52 tahun 2017, yang ke lima dihalaman 75 di tambahkan keterangan satuan juta barrel gambar 5.9 juga MSCF untuk gambar 5.12 dan keterangan satuan milliyar USD untuk gambar 5.10 dan 5.13, pada dasarnya keterangan pada gambar.

- **Tanggapan : Bayu – SKK Migas**

- Tambahan saja untuk gambar-gambar ini, sudah ditambahin betul tapi penyajiannya masih salah mohon untuk di refer ke email sebelumnya kami sebelumnya karena penyajiannya WK itu ada yang konsistensi untuk yang gas ada WK ada kontaktor disamakan saja pak, kalau di wilayah kerja jadinya disatukan saja WK Mahakam meskipun disitu ada Inpex dan Total sebagai kontraktor (Jawab : Oke jadi berdasarkan Wilayah Kerjanya(WK)) itu sudahkita buatkan juga grafiknya pada saat kita sampaikan.
- Halaman 85, kita sebetulnya bicara di wilayah kerja tapi penyajian dibawahnya berdasarkan kontraktor jadi nanti kita melihatnya berbeda format yang didapat, mana yang WK menghasilkan yang terbanyak, Mahakam seperti terdistorsi. Jadi Mahakam on shore dan off shore harusnya dijadikan satu saja. Karena penyajiannya masih per KKKS.
- Kemudian untuk yang dibawahnya yang gas, halaman 87 nah ini penyajiannya per perusahaan tadi kita bicara mengenai WK ditambahkan saja per perusahaan (Jawab : jadi judulnya kita ganti juga ya per WK ya bukan per perusahaan) yang di Mahakam juga dijadikan satu karena kita ngomongnya per WK jadi biar tidak ada 2 WK, mungkin naik satu WK, namanya WK Senoro kalau tidak salah (Jawab : Senoro nya ada 2 ya Senoro

Total dan Senoro PHE.

- Ada penambahan lagi penyajian sumber data semua gambar kita lihat datanya dan yang terakhir menunya diberikan pilihan bagi kontraktor minta dimasukkan pendapat dari pihak ketiga. Dan untuk yang dihapus ada 3 Permen ESDM nomor 14 tahun 2019 dan nomor 8 tahun 2017 ini permen mengatur harga untuk gas bumi untuk kegiatan usaha hilir bukan untuk hulu migas jadi dihapus.
- Dihalaman 75 volume lifting 241 juta MSCF hanya berasal dari blok Berau sehingga Muturi dan Wiri agar tidak dihapus, dan terakhir data terkait responsibility spending tidak terdapat dalam FGR online, Nah itu tadi untuk yang di tambah dan yang dihapus.
- Untuk yang revisi ada 51 item apakah mau dibahas satu per satu semuanya ada disini, untuk yang migas cukup ya pak sesuai dengan masukan bapak, untuk yang mineral ada 13 item semuanya revisi untuk mineral ada 13, 9 batubara dan 4 mineral semuanya revisi jadi pada dasarnya revisi kalimat juga dan revisi dari pada kesalahan penulisan seperti PP nomor 55 semuanya sudah dimasukkan dan revisi mengenai jumlah smelter dan produksi mineral juga danyang terakhir Emas, Perak, Bauksit dan Nikel yang terakhir tabel ekspor mineral itu juga sudah di revisi yang lainnya relatif salah tulisan seperti PKP2B singkatannya apa dan keterangan pada gambar dan keterangannya tidak sinkron itu sudah di sinkronkan demikian dari kami mungkin ada masukan?

- **Tanggapan : Arif- Konsultan IA**

- Kemarin masukan dari Pak Bastian tentang pemerintah untuk produksi 169 tentang perlunya pemerintah mengatur tentang kewenangan instansi hilirasi sesuai dengan karakteristik jadi ditambahkan penjelasannya yang terintegrasi masih masuk ke dalam kewenangan ESDM sedangkan yang berdiri sendiri menjadi kewenangan Kementerian Perindustrian, jadi itu sudah kita tambahkan penjelasannya.

- **Tanggapan : Ilham- Ditjen Minerba Kementerian ESDM**

- Mohon ijin Bapak pimpinan rapat, untuk 13 masukan tadi saya lihat sudah diakomodir untuk hari rabu kami ada susulan masukan ada beberapa saya cek belum masuk perbaikannya dihalaman 14 yang hulu diganti dengan eksplorasi hilir diganti dengan operasi produksi dihalaman 14 dan 16 masih belum diganti yang satu narasi dan satunya digambar.
- Kemudian di halaman 35 ijin usaha pertambangan rakyat IUPR yang benar hanya IPR halaman 35 di bagan, (Jawab : mungkin di halaman 32 maksudnya pak? IUPR menjadi IPR).
- Selanjutnya proses lelang dihalaman 35 untuk narasi sudah diperbaiki hanya saja alurnya masih menggunakan aturan yang lama permen 28 tahun 2013 untuk aturan yang baru ada 12 tahap mohon disesuaikan saja ada di kepmen ESDM nomor 24 tahun 2019 ada 12 tahapan kalau yang permen lama hanya 5 tahapan.
- Sebetulnya ada masukan juga ini kan datanya cut off nya per november yang IUP CNC kalau di buku yang lama di halaman 72, di halaman 65 kalau disinikan cut offnya agustus kalau masih bisa di akomodir per status november itu jumlahnya 1507 ini masukan per november, ini masukan saja kalau masih bisa di akomodir tapi kalau mau pakai yang agustus keterangannya agustus ada perbedaan datanya dari 1438 ke 1507. Sebetulnya dari unit mineral sendiri memang waktu untuk mengkoreksi masih kurang karena kami baru dapat softcopy setelah rapat jumat kemarin dan tepotong libur jadi baru kami distribusikan ke unit hari senin, dan hari senin itu baru masukan dari Direktorat Batubara Mineral dan Program jadi waktunya juga tidak cukup kedepannya sambil menyusun narasi dari mineral bisa dilibatkan seperti yang regulasi sudah langsung terupdate jadi endingnya tidak terbaca semua jadi rekomendasi atau temuannya yang basic sudah diselesaikan melalui rapat khusus antara IA dan Minerba. Untuk ke depan time frame waktunya bisa paralel ketika menyusun narasi bisa berkoordinasi dengan mineral karena dari mineral sendiri unitnya ada 6 unit yang perlu di koordinasikan.
- Catatan dari kami maksudnya kami juga berharap pada waktu buat cut off nya prosesnya juga seperti itu, oke pak ada lagi? Dari Minerba sudah dari Migas sudah. Saya pikir sudah pak.

4. **Edi Effendi – Sekretariat EITI**

- Dari BPKP dan Pajak mungkin masukkan? Dari Anggaran ada lagi? SKK Migas?

- **Tanggapan : Bayu – SKK Migas**

- Masukan lagi akan kami sampaikan di email saja ya pak, apa yang kita sampaikan tadi tidak merubah struktur juga tidak ada tambahan hanya catatan saja yang tadi.

5. Edi Effendi – Sekretariat EITI

- Jika sudah tidak ada lagi kita bisa sepakati laporan ini menjadi final, masuk yang kecil kecil sampai dengan senin bisa disampaikan ke Tim IA dan kita kasih waktu IA untuk mem-finalkan dan di layout dan sudah tidak bisa dirubah lagi.
- Jika semua Bapak Ibu anggota MSG yang hadir hari ini sudah sepakat kita setuju dengan masukan hari ini yang terakhir draft final report ini menjadi final report dan nanti kami minta persetujuan dari Bapak Ibu untuk persetujuan tertulis dan suratnya sudah kita siapkan jika Bapak Ibu punya kuasa untuk tanda tangan silahkan di tanda tangani tapi kalau harus dibawa ke Direktur silahkan dibawa pulang untuk di tanda tangani Direktur mungkin bisa kita tunggu setelah natal paling lambat Jumat depan tapi jika ada catatan bisa senin disampaikan ke temen-temen IA untuk memprosesnya.
- Jadi kita sepakati final ya Bapak Ibu anggota MSG ? oke terimakasih . Untuk selanjutnya saya serahkan ke Pak Bastian.

D. Penutup

Rapat ditutup oleh Bapak Ahmad Bastian Halim, Asisten Deputi Industri Ekstraktif Sekretaris Tim Pelaksana EITI dengan menyampaikan bahwa setelah persetujuan agar perwakilan dari Tim Pelaksana dapat menandatangani form persetujuan agar Laporan EITI 2017 dapat segera diupload di web EITI Indonesia .

E. Simpulan dan Saran

Rapat menyetujui draft Laporan EITI 2017 menjadi final Laporan EITI 2017.

Mengetahui,

Asisten Deputi Industri Ekstraktif,
Selaku Sekretaris Tim Pelaksana Transparansi
Industri Ekstraktif.

Ahmad Bastian Halim